## STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PROGRAM BELAJAR SEPANJANG HAYAT DI INDONESIA

Disampaikan pada Seminar Internasional Pendidikan Luar Sekolah, yang diselenggarakan oleh Prodi PLS-SPS UPI, Bandung Tanggal 29 November 2010.

## Oleh Achmad Hufad, Jhoni R Pramudia, Sardien Supariatna

#### **Abstrak**

Program belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan belajar secara wajar dan luas kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajarnya secara belajar kelompok (group learning), dan perorangan (individual learning), melalui ragam media massa, ragam tempat belajar dan bentuk belajar . Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meriview dan menganalisis konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam kebijakan pendidikan dan penjabarannya ke dalam perencanaan, strategi, dan program yang menuju aksi; (2) mengumpulkan kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" implementasi program belajar sepanjang hayat di lapangan; (3) mendeskripsikan dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam beberapa kebijakan pendidikan produk vang mengkonseptualisasi belajar sepanjang hayat menjadi prinsip dan asas penyelenggaraan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam berbagai jenis, jenjang dan program pendidikan. Konseptualisasi dan pengungkapannya dapat dicermati dalam beberapa produk kebijakan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penjabaran belajar sepanjang hayat dalam perencanaan, strategi, dan program aksi dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

Kata kunci: Studi Implementasi, Program Belajar Sepanjang Hayat

#### Pendahuluan

Urgensi berkembangnya belajar sepanjang hayat di Indonesia, dilatarbelakangi oleh kondisi nyata (real conditons) masyarakatnya yang

dihadapkan pada kian banyaknya pengangguran, bertambahnya penduduk miskin, melemahnya standar kehidupan dalam populasi penduduk yang makin bertambah, makin tajamnya jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadi inspirasi kunci (*key inspiration*) bagi berkembangnya belajar sepanjang hayat melalui pengembangan potensi manusia (*the development of human potential*).

Program belajar sepanjang hayat memberikan kesempatan belajar secara wajar dan luas kepada setiap orang sesuai dengan perbedaan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Kesempatan ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk belajar seperti program-program kegiatan belajar kelompok (group learning), kegiatan belajar perorangan (individual learning), dan kegiatan belajar melalui media massa. Kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan di berbagai tempat yaitu di tempat kerja, rumah ibadat, rumah tinggal; gedung perkumpulan, sekolah, tempat bermain, lapangan olah raga, gelanggang remaja/pemuda, majelis ta'lim, padepokan, perpustakaan, pusat-pusat pembelajaran, panti dan lain sebagainya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meriview dan menganalisis konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam kebijakan pendidikan dan penjabarannya ke dalam perencanaan, strategi, dan program yang menuju aksi; (2) mengumpulkan kasuskasus yang menggambarkan "good practice" implementasi program belajar sepanjang hayat di lapangan; (3) mendeskripsikan dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

### Metoda dan Teknik Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang bersifat eksploratif untuk menghimpun dan merumuskan kemungkinan penentuan kebijakan berdasarkan informasi yang terkumpul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan studi dokumentasi.

Studi kasus diarahkan pada upaya untuk menggambarkan contoh-contoh konkrit (good practice) penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat, dan dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individual dan masyarakat dilhat dari aspek social dan ekonomi. Sedangkan studi dokumentasi lebih difokuskan aspek konseptualisasi dan kebijakan belajar sepanjang hayat baik pada level pusat, nasional, maupun pada tingkat kabupaten/kota.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara obervasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Dalam analisisnya, penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif yang bersifat naratif.

Obyek penelitian ini adalah implementasi dan implikasi program belajar sepanjang hayat yang sedang berlangsung saat ini serta mendeskripsikan arah kebijakan untuk penguatan program belajar sepanjang hayat sekarang dan ke depan. Dengan subyek teridiri atas (a) Sejumlah produk kebijakan pendidikan pada level provinsi, kabupten/kota (Renstra/Profil Pendidikan, Pergub, Perbub, Perwal, dll); (b) Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggara program belajar

sepanjang hayat (Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kecakapan Hidup). Dengan responden: (1)Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (2)Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (3)Kepala SKB (4)Tutor Keaksaraan Fungsional; Pendidikan Perempuan, Lifeskills (5).Penge nmmnblola program (Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Perempuan, Lifeskills (6)Lulusan program pendidikan Keaksaraan Fungsional; Pendidikan Perempuan, Lifeskills (7)Tokoh masyarakat

Lokasi penelitian dikonsentrasikan di tiga wilayah di lima provinsi yang dipandang merepresentasikan karakteristik nasional, yaitu Indonesia wilayah barat, tengah, dan timur. Wilayah barat diwakili oleh Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Jawa Barat (Kabupaten/Kota Sukabumi) dan Jawa Tengah (Kab/Kota Semarang). Wilayah tengah diwakili oleh Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), dan wilayah timur diwakili oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar).

Produk kebijakan yang dianalisis, yaitu: (1)Kebijakan Nasional berupa UU, PP dan Permen; (2) Kebijakan Provinsi, berupa PRIMD, Perda, Renstra SKP, SK Disdik; (3) Kebijakan Kabupaten/Kota, berupa RPJMD, Perda, SK Pemkab/Pemkot, Renstra SKPD, SK Dsidik.

Fokus dan Aspek yang Diteliti mencakup (1) Konseptualisasi program belajar sepanjang hayat dalam kebijakan pendidikan, dan interpretasinya ke dalam perencanaan, strategi, dan program yang menuju aksi; (2) Kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" dalam implementasi program belajar sepanjang hayat di lapangan; (3) Dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

#### Hasil dan Pembasan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian tentang implementasi program belajar sepanjang hayat dilakukan di lima provinsi di Indonesia. Di kelima provinsi tersebut, penelitian difokuskan pada program-program belajar sepanjang hayat (baca pendidikan nonformal) yang diselenggarakan pada satuan-satuan pendidikan nonformal, khususnya program-program yang diselenggarakan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Untuk memperkuat dan memperkaya data yang diperlukan, terutama data yang berkaitan dengan produk kebijakan pendidikan sepanjang hayat di daerah, maka pada setiap provinsi, penelitian diperluas target subjeknya ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Fakta empirik yang sesungguhnya, di Indonesia praktek belajar sepanjang hayat kurang begitu dikenal dan jarang digunakan sebagai terminologi program pendidikan. Masyarakat dan institusi penyelenggara pendidikan lebih akrab dengan istilah pendidikan nonformal atau lebih dikenal lagi istilah pendidikan luar sekolah. Program-program belajar sepanjang hayat dimaksud, pada kenyataannya telah lama dilaksanakan di Indonesia dalam jenis dan bentuknya yang beragam.

#### A. Deksripsi Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah argumen dan alasan-alasan akademik-metodologis, sebagai berikut: (a)Pertimbangan keterwakilan wilayah dan provinsi di Indonesia; (b)Tiap wilayah atau lokasi memiliki keragaman penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat. (c)Program belajar sepanjang hayat pada setiap wilayah atau lokasi penelitian merepresentasikan contoh program yang baik (good practice).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan 5 provinsi yang terdistribusi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Di setiap provinsi tersebut dipilih 1 kabupaten/kota. Uraian selengkapnya mengenai lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
LOKASI PENELITIAN

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Sumatera Selatan	Kota Palembang
2	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi
3	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang
4	Kalimantan Barat	Kota Pontianak
5	Sulawesi Selatan	Kota Makassar

Sebaran program belajar sepanjang hayat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap provinsi, pemetaannya ditunjukkan dalam gambar berikut:

Bandung

Yogyakarta

Mojokerto

Pasuruan

Bali

Lombok Barat

Gambar 1: Lokasi Sebaran Program BSH

4 |

GAMBAR DI ATAS, LOKASINYA DISESUAIKAN DENGAN PENELITIAN LLL (5 KOTA: PALEMBANG, SUKABUMI, UNGARAN/SEMARANG, PONTIANAK, DAN MAKASAR). KALAU GA ADA YANG BISA DIBUANG SAJA!

#### **B.** Analisis Hasil Penelitian

Atas dasar pertimbangan anggaran yang kurang memadai dan waktu yang relative terbatas, analisis terhadap hasil peneltian ini konsisten difokuskan pada tiga dimensi pokok, yaitu: (1) Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia; (2) Kasus-kasus yang menggambarkan "good practice" implementasi program belajar sepanjang hayat; (3) Dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi.

Kebijakan pendidikan yang dianalisis adalah kebijakan-kebijakan pendidikan yang secara langsung bersinggungan, berkaitan, dan bahkan bersinergi dengan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat, baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Contoh-contoh praktek belajar sepanjang hayat yang baik dianalisis dari kasus-kasus pada setiap lokasi penelitian di lima provinsi. Pemilihan dan penetapan contoh "good practice" dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar.

Analisis dampak program belajar sepanjang hayat terhadap pemberdayaan individu dan masyarakat dilihat dari konteks sosial dan ekonomi, dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lulusan program belajar sepanjang hayat pada semua jenis dan jenjang pendidikan, terutama lulusan yang sudah bekerja dan secara ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum mengikuti program belajar sepanjang hayat.

## 1. Konseptualisasi Belajar Sepanjang Hayat dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Sampai saat ini, Indonensia belum memiliki satupun payung kebijakan yang langsung mengatur belajar sepanjang hayat. Berbeda dengan Jepang yang sejak tahun 1990 sudah memiliki Undang-undang *Lifelong Learning Promotion*, yang merupakan kunci reformasi pendidikan dan administratif di Jepang. Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan di Indonesia, masih berupa penggalan-penggalan yang bersifat parsial dan dalam bentuknya yang beragam. Ada yang secara eksplisit menggunakan terminologi program pendidikan atau belajar sepanjang hayat, selebihnya menggunakan terminologi lain yang biasa digunakan dalam pendidikan nonformal.

Analisis dokumen yang dilakukan terhadap produk kebijakan pendidikan, baik pada level nasional, provinsi, dan kebupaten/kota difokuskan pada aspekaspek berikut:

- a. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat
- b. Jenis Program Belajar Sepanjang Hayat
- c. Peran Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat dan Kemitraan

- d. Struktur Administratif, Anggaran, dan Ketenagaan pada Program Belajar Sepanjang Hayat
- e. Substansi Program Belajar Sepanjang Hayat
- f. Metodologi Pembelajaran dan Mekanisme Penyampaian
- g. Jaringan antara Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal
- h. Penciptaan Lingkungan Belajar

#### a. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat

Payung hukum yang langsung mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal yang menjelaskan secara langsung istilah pendidikan sepanjang hayat tercantum dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, Ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat". Bagian lain yang membahas tentang ini adalah Bab IV, Bagian Kesatu tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5, Ayat (5) yang menjelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat".

Penjabaran berikutnya dari terminologi program belajar sepanjang hayat dijelaskan dalam bab dan pasal yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, program belajar sepanjang hayat lebih sering diposisikan dalam kerangka berfikir jalur pendidikan nonformal sesuai ruang lingkup dan pembatasan penelitian. Pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan, disamping pendidikan formal dan informal dalam kerangka sistem pendidikan nasional (Pasal 13, Ayat 1).

Pendidikan sepanjang hayat dalam kaitannya dengan kegiatan Pendidikan Non Formal, telah memberikan arah dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan kegiatan Pendidikan Non Formal. Prinsip-prinsip Pendidikan Non Formal tersebut meliputi:

- 1) Pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana.
- 2) Pendidikan Non Formal mendorong motivasi yang kuat bagi semua peserta didik untuk berperan dalam merencanakan dan melakukan kegiatan belajar secara terorganisir (organized) dan sistematis.
- 3) Kegiatan belajar ditunjukkan untuk memperoleh, memperbaharui pengetahuan dan aspirasi yang telah dan harus dimiliki oleh peserta didik.
- 4) Pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri setiap peserta didik yang menjalani kegiatan belajar.
- 5) Perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia.
- 6) Pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan persekolahan.

Prinsip-prinsip tersebut memunculkan pula ciri-ciri Pendidikan Non Formal yaitu :

1) Memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia dan kebutuhan belajar masing-masing.

- 2) Dalam menyelenggarakan pendidikannya selalu melibatkan peserta didik dimulai sejak kegiatan perencanaan, pelaksanaan, proses, hasil serta sampai pada pengaruh kegiatan belajar yang dilaksanakan tersebut.
- 3) Memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan kehidupan individu yang dilaksanakan didalam proses pendidikannya.

## b. Jenis Program dan Satuan Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 ayat 3, mengklasifikasi program pendidikan nonformal ke dalam beberapa program, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Uraian dalam Pasal 26 ayat 3 mengenai jenis program belajar sepanjang hayat menjadi arah pembangunan nasional, terutama pembangunan pendidikan. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional.

Dalam RPJM ini dirumuskan arah program penguatan kebijakan Depdiknas yang terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, yang kemudian menjadi kegiatan pokok pemerintah. Program-program tersebut antara lain:

- c. Pendidikan Anak Usia Dini
- d. Perluasan akses PAUD (PAUD) TK, RA, KB, TPA
- e. Perluasan akses pendidikan wajib belajar pada jalur nonformal
- f. Pengembangan program Pendidikan Nonformal
- g. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun
- h. Pendidikan Kecakapan Hidup
- i. Perluasan pendidikan kecakapan hidup
- j. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi program pendidikan nonformal
- k. Pemanfaatan ICT sebagai media pembelajaran jarak jauh
- 1. Pengembangan Budaya Baca

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini kemudian dijabarkan agi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional yang berdurasi setiap tahun. Dan lebih spesifik lagi dijabarkan dalam program strategis Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Adil Gender, dan Pendidikan Keakapan Hidup.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sepanjang hayat pada daerahdaerah yang menjadi lokasi penelitian menjadikan bervariasinya program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pembuat kebijakan di daerah yang melaksanakan sesuai dengan acuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan non formal dari pusat. Kesadaran ini kemudian diaktualisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberagaman program pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap daerah yaitu pada satuan pendidikan sepanjang hayat yang diteliti (PKBM), program yang dikembangkan relatif sama khususnya pada tempat atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), antara lain:

- a. Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A Setara SD, Paket B Setara SLTP dan Paket C Setara SMU,
- b. Pendidikan keaksaraan fungsional,
- c. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill),
- d. Pengembangan Minat Baca melalui Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Komunitas
- e. Kursus dan Pelatihan Keterampilan,
- f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- g. Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Pendidikan Kewirausahaan/Kelompok Belajar Usaha
- i. Pendidikan Kepemudaan, Rekreasi dan Olahraga/Kelompok Belajar Olahraga (KBO)
- j. Pengembangan Program Magang

Mengenai satuan pendidikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 10, menjelaskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam jalur pendidikan nonformal, Pasal 26 ayat 4, disebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal dikelompokkan ke dalam lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

# c. Peranserta dan Kemitraan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat

Peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Terutama di daerah, kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dari pemerintah dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, oleh jajaran dinas pendidikan, yang berfokus pada tiga jalur pendidikan, meliputi pendidikan formal, pendidikan informal, dan non formal.

Dalam batas tertentu, koordinasi antara pengelola jalur pendidikan persekolahan, PNF dan setiap orang yang memiliki kepedulian pada program pendidikan informal dengan disdik/kasi dikmas/SKB, ditandai oleh adanya pertemuan yang terprogram, baik antar pengelola jalur pendidikan formal, jalur non formal dan jalur informal dengan instansi terkait, seperi dinas pendidikan, instansi pemerintah tertentu, sektor swasta dan mitra kerja lainnya. Koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dari pemerintah/dinas pendidikan sering terputus-putus, tidak konsisten dan tidak berkesinambungan. Penilik pendidikan adakalanya kurang progesif dan kurang menguasai permasalahan. Koordinasi lintas sektoral cenderung belum berjalan

bahkan sebagian besar isntansi tidak mengetahui keberadaan pendidikan sepanjang hayat secara jelas. Instansi-instansi hanya mengetahui PSH sebatas penyelengara Program Kejar Paket A,B,C itupun setelah adanya gejolak hasil Ujian Nasional yang mengaharuskan bagi peserta yang gagal untuk ikut persamaan Kejar Paket.

Pada level provinsi yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten. Pada tingkat kecamatan pelaksana teknis dalam pembinaan yaitu Penilik Pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun Pendidikan Luar Sekolah. Dalam menjalankan tugas penilik PLS dibantu oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD).

Institusi perguruan tinggi belum terlibat dalam pebinaan secara intensif. Keterlibatan perguruan tinggi hanya sebatas satu dua orang, itupun, keterlibatannya baru bersifat personal, tidak secara kelembagaan. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat kurangnya koordinasi dan adanya semacam krisis kepercayaan antar lembaga perguruan tinggi dengan birokrasi pemerintah yang bermuara pada sikap saling menunggu, bukan bersikap pro aktif.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (NGO) dalam penyelenggeraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber belajar, pelaksana, dan pengguna pendidikan (Pasal 54, ayat 1 dan 2).

Terkait dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat, Pasal 55 ayat 1 dan 2 mengungkapkan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan social, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada permintaan saran, ide-ide atau gagasan dalam perintisan dan penyelenggaraan program-program pendidikan sepanjang hayat yang dikembangkan oleh PKBM ataupun program pendidikan sepanjang hayat lainnya. Keterlibatan lebih jauh, terutama dalam bentuk struktur kepengurusan sebagai pembina, atau penasehat masih kurang.

Kontribusi yang diberikan baru berupa saran-saran tentang program yang diselenggarakan dan materi yang seyogyanya dikaji didalam program satuan pendidikan sepanjang hayat. Hingga saat ini potensi pembelajaran yang terdapat di lingkungan masyarakat, yang secara umum telah dimanfaatkan diantaranya berupa sarana yang ada, seperti; rumah-rumah atau lahan milik tokoh masyarakat atau pengurus (RT/RW), kantor dan ruangan serba guna di lingkungan RW atau sarana yang dimiliki oleh kelurahan atau desa.

Di masa depan diharapkan program yang diselenggarakan lebih beragam dan mampu menjangkau lebih banyak warga masyarakat yang membutuhkan. Pengembangan program pendidikan di PKBM ke depan diharapkan lebih diutamakan, mendapat dukungan dari masyarakat secara penuh, dan harus didukung oleh sarana prasarana dan dana yang memadai dari pemerintah.

Kemitraan dalam pengembangan pendidikan sepanjang hayat dapat dinilai strategis untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan merumuskan model kerjasama yang harmonis dan strategik diantara para pelaku program.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks peningkatan perekonomian masyarakat model kemitraan diperlukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam program pemberdayaan masyarakat. Beberapa kemitraan yang telah dirintis dan dikembangkan oleh lembaga pendidikan sepanjang hayat diantaranya dalam bentuk kerjasama pelatihan penguatan keterampilan tutor dan warga belajar, manajemen kelembagaan, pemasaran (marketing) produk program PSH, dan outsourcing ketenagaan PSH. Lembaga-lembaga yang menjalin kemitraan dengan institusi/satuan pendidikan sepanjang hayat, antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Dinas Sosial, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Perusahaan dan Industri, Badan Diklat seperti Balai Latihan Kerja Industri, Balai Latihan Koperasi dan UKM, dan beberapa komunitas wirausaha di sektor informal.

Keterlibatan *stakeholder* dalam penyelenggaraan program pendidikan sepanjang hayat belum menunjukkan *performance* yang menggembirakan. Keterlibatan yang cukup menonjol baru ditunjukkan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang berada dalam lingkup tugas Dinas Pendidikan, khususnya subdin PLS. Namun demikian, sistem koordinasi dengan dinas atau instansi lain berjalan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan diakui oleh para peserta diskusi dalam prakteknya masih terbatas pada beberapa instansi tertentu.

## d. Struktur Kelembagaan, Anggaran, dan Ketenagaan pada Program Belajar Sepanjang Hayat

Pengembangan dan implementasi program belajar sepanjang hayat pada jalur pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan pada lembaga-lembaga teknis, baik pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat secara luas. Kelembagaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI)
- b. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI)
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
- e. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis)
- f. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- g. Lembaga Kursus dan Pelatihan
- h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
- i. Organisasi perempuan dan kepemudaan
- j. Satuan PNF lainnya (Majelis Taklim, HIPKI, HISPPI, asosiasi propesi, forum PAUD, forum PKBM, dbs

Visi kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal adalah "terwujudnya manusia Indonesia pembelajar sepanjang hayat". Visi ini selanjutnya dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

- a. Program pendidikan anak usia dini (PAUD) bermutu yang mampu "melejitkan" kecerdasan anak, membentuk kesiapan belajar lebih lanjut, serta melaksanakan pelayanan dengan jangkauan sasaran yang semakin meluas, merata, dan berkeadilan.
- b. Program pendidikan keaksaraan bermutu yang mampu meningkatkan kompetensi keaksaraan pada semua tingkatan (dasar, fungsional, dan lanjutan) bagi penduduk buta aksara dewasa secara meluas, adil dan merata untuk mendorong perbaikan kesejahteraan dan produktivitas penduduk, dan ikut serta dalam mendukung perbaikan peringkat IPM.
- c. Program pendidikan kesetaraan bermutu dan relevan yang mampu meningkatkan kecakapan hidup, termasuk kesiapan kerja, produktivitas dan kemandirian peserta didik, serta dalam rangka mendukung keberhasilan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan perluasan akses pendidikan menengah nonformal.
- d. Kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (PKH) yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
- e. Terwujud pendidikan yang berkeadilan gender melalui peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan serta mendukung upaya pencegahan diskriminasi, traficking, dan tindak kekerasan sebagai wujud perlindungan HAM.
- f. Masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan-bahan bacaan yang berguna baik bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi peningkatan produktivitas mereka.
- g. Terwujud peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai, serta ketenagaan yang profesional, dan satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi agar mampu menjangkau sasaran yang semakin luas, adil dan merata serta dapat memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang terus berkembang.

Anggaran atau Pembiayaan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Pasal 48, Ayat 1). Sedangkan sumber pembiayaan diatur dalam Pasal 47, Ayat (1) yang berbunyi bahwa "Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketenagaan program dan satuan pendidikan nonformal diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28, ayat (1) yang mengharuskan pendidik memiliki kuaifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 29, ayat (1) mengatur kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan tinggi, dan sertifikat profesi guru untuk Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 30, ayat (7) menjelaskan mengenai kualifikasi pendidik/tutor pada program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Dilanjutkan pada Pasal 33, ayat (1)

yang mengharuskan tenaga pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Mengenai tenaga kependidikan pada program dan satuan pendidikan nonformal, diuraikan dalam Pasal 35, ayat (1), bagian (f) dan (g). Bagian (f) mengatur tentang tenaga kependidikan pada program kesetaraan (Paket A, B, dan C) yang sekurang-kurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Sedangkan pada bagian (g) diatur tentang tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan keterampilan yang menuntut adanya pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran. Adapun kualifikasi untuk tenaga kependidikan nonformal diatur dalam Pasal 37, ayat (1).

Gambaran selengkapnya mengenai ketenagaan belajar sepanjang hayat pada jalur pendidikan nonformal dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Tenaga pendidik PNFI meliputi
  - 1) Pamong belajar UPT P2PNFI dan BPPNFI, UPTD BPKB/SKB
  - 2) Fasilitator desa intensif (FDI)
  - 3) Tutor KF
  - 4) Tutor Paket A, B, C
  - 5) Tenaga pendidik dan pengasuh PAUD
  - 6) Tenaga pendidik dan penguji praktek kursus
  - 7) Narasumber teknis KBU
  - 8) Tenaga pendidik PNF lainnya (instruktur magang)
- b. Tenaga Kependidikan PNFI yaitu:
  - 1) Penilik
  - 2) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD)
  - 3) Pengelola PKBM
  - 4) Pengelola Kelompok Belajar
  - 5) Pengelola Kursus
  - 6) Pengelola TBM
  - 7) Pengelola PAUD
  - 8) Tenaga kependidikan satuan PNF lainnya (pengelola KBU/Magang, laboran, pustakawan, dsb).

#### e. Substansi Program Pembelajaran dan Sasaran Langsung

Dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B, dan Paket C) disebutkan mengenai cakupan kelompok mata pelajaran sebagai berikut:

- a. Agama dan Akhlak Mulia
- b. Kewarganegaraan dan Kepribadian
- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Estetika
- e. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

Kurikulum program belajar sepanjang hayat dikembangkan prinsip-prinsip berikut:

a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan

- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentngan nasional dan daerah
- h. Tematik
- i. Partisipatif

Kandungan program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat selalu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Terkait dengan kondisi masa lalu, kondisi saat ini dan kebutuhan di masa datang sesuai dengan umur, kemampuan, potensi lingkungan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
- b. Bersifat holistik dan komprehensif serta memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, dan aktualisasi diri.
- c. Memberdayakan peserta didik agar mampu mengembangkan diri dan menghadapi tantangan.
- d. Mengembangkan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional sehingga dapat mewujudkan insan Indonesia yang kooperatif, demokratis, berbudaya, dan kompetitif.
- e. Mampu mengembangkan lima kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual dan kinestetik.

Materi belajar pada program belajar sepanjang hayat dikembangkan oleh beberapa unsur sebagai berikut-:

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan/atau telah mengikuti pelatihan fungsional di bidang pendidikan nonformal.
- b. Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang telah memiliki legalitas formal dari Dinas Pendidikan (Subdin Pendidikan Nonformal).
- c. Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PNFI dan Balitbang) yang membidangi pengembangan kurikulum.
- d. Badan Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi)

Cara mengembangkan materi belajar pada program belajar sepanjang hayat adalah:

- a. Dikembangkan sendiri oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta lembaga penyelenggara pendidikan nonformal
- b. Bekerjasama dengan satuan yang relevan dalam mengembangkan materi belajar sepanjang hayat.
- c. Melibatkan perguruan tinggi, para profesional dan para pakar pendidikan nonformal.
- d. Melakukan kolaborasi antarinstansi pemerintah, instansi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha/industri.

## f. Metodologi Pembelajaran dan Mekanisme Penyampaian

Program belajar sepanjang hayat diselenggarakan dalam berbagai modus, bentuk, dan cakupn yang didukung oleh sarana dan layanan bekajar serta system penillaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003; Pasal 31, Ayat 3).

Metode yang dipergunakan dalam program belajar sepanjang hayat disesuaikan dengan substansi materi dari program yang dikembangkan. Pada program kesetaraan metode yang dipergunakan relatif sama dengan pendidikan formal hanya memiliki memiliki beberapa perbedaan yaitu lebih banyak metoda yang dipergunakan untuk belajar mandiri karena waktu belajar yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Adapun yang memiliki kekhasan adalah metoda yang dikembangkan untuk pendidikan keaksaraan fungsional, dimana pembelajaran dilaksanakan secara *tematik* sehingga warga belajar tidak merasa bosan dan jenuh. Sedangkan metoda yang dipergunakan untuk program *life skill* lebih banyak mempergunakan demonstrasi dan simulasi untuk materi pelajaran praktek dan cermah untuk mata pelajaran teori.

Mengenai standar proses belajar sepanjang hayat, diatur dalam Peraturan Pemerinah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

Proses penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat disarankan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaannya program belajar sepanjang hayat memerlukan bahan belajar berupa media cetak dan perpustakaan yang lengkap
- 2) Proses pembelajaran menjadi optimal jika didukung oleh pengalaman belajar datang dari kebutuhan/ mandiri
- 3) Pembelajaran pada program belajar sepanjang hayat di suatu tempat akan berlangsung, jika kelompok-kelompok belajarnya, dibantu oleh tutor dan orang lain yang memiliki pengalaman
- 4) Sarana yang dikelola dengan baik
- 5) Program pendidikan dan pembelajaran yang terstandar
- 6) Adanya tempat untuk belajar/ruang pertemuan
- 7) Keanekaaragaman sumber belajar dan kemudahan terhadap akses sumbersumber belajar
- 8) Adanya tenaga tutor yang qualified.
- 9) Adanya kurikulum yang merepresentasikan kebutuhan belajar dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 10) Penggunaan metode dan teknik pembelajaran yang bervariasi
- 11) Media dalam bentuk bahan cetak karena tidak memerlukan listrik dan alat bantu lain
- 12) Inti pembelajaran adalah transfer dan tansformasi dengan mengacu pada pola just in time dan just in case.
- 13) Penggunaan media teknologi informatika komunikasi yang tersedia dimasyarakat sangat diperlukan. Dan dapat direkomendasikan untuk dijadikan salah satu media unggul.
- 14) Proses pembelajaran dilakukan secara bervariasi melalui:
  - Belajar mandiri,
  - Belajar dengan tatap muka/classroom based,
  - Belajar melalui magang

- Belajar secara berkelompok.
- 15) Proses disesuaikan dengan latar belakang peserta didik, jenis program yang dipelajari (mandiri, tatap muka, kelompok)
- 16) Proses yang berbasis: induktif, tematik dan berbasis kecakapan hidup

## g. Jaringan antara Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal

Belajar sepanjang hayat merupakan proses kontinum dari elemen-elemen yang saling berkaitan (*interdependent*), yang dilandasi oleh kebutuhan individu dalam pendidikan sepanjang hidupnya. Proses belajar sepanjang hayat yang merentang dari pendidikan formal, non formal hingga informal.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan perlunya penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat bersinergi antara pembelajaran formal, nonformal, dan informal. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dijelaskan bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Kedudukan ketiga jalur tersebut dalam perspektif undang-undang jelas setara dan tidak menunjukkan hirarki kualitas, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (6) bahwa "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Hal-hal lain yang berkenanaan dengan jaringan (*linkage*) antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah program pindah jalur. Program pindah jalur dalam rangka kesetaraan pendidikan diatur secara lengkap pada UU No 20 tahun 2003 dan Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005. Dari dua perundangan ini selanjutnya dijabarkan pada Permendiknas No 22 tentang Standar Isi dan No 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Pasal utama yang terdapat pada Undang-Undang yaitu pasal 12 Ayat (1) hak peserta didik untuk pindah antar jalur pendidikan. Seperti ditekankan pula Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Untuk menjamin kebermaknaan dan pemenuhan prinsip keadilan serta mutu pindah jalur dalam rangaka pendidikan kesetaraan secara khusus diatur pada permendiknas di atas. Pada dasarnya Peraturan Menteri yang pertama mengatur mengenai syarat minimal dan arah kompetensi dari setiap jenjang, sedangkan Peraturan Menteri yang kedua menekankan pada kompetensi termasuk kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh semua satuan dan jenjang pendidikan. Idealnya standar isi maupun standar kompetensi lulusan harus berimbang pada semua jalur.

Dalam pelaksanaannya program pindah jalur dan kesetaraan belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil penelitian, egosektoral dan kinerja masing-masing satuan menjadikan hambatan untuk terjadinya pindah jalur. Kelemahan yang terjadi pada satuan pendidikan sering demikian tertutup sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan perbaikan dari sub sistem lain. Sebaliknya keunggulan yang dimiliki oleh sub sistem tidak mendapatkan pengembangan sehingga terjadi kemandegan dalam mengembangkan keunggulan

yang dimiliki. Pendidikan formal lebih menekankan pada pencapaian materi kurikulum dengan mengabaikan penyerapan dan internalisasi terutama dikaitkan perubahan sikap dan prilaku. Sebaliknya pendidikan nonformal dengan segala keterbatasannya tidak menggunakan keunggulan belajar mandiri dan berorintasi pada kehidupan nyata seperti yang dijadikan jargon selama ini.

## h. Penciptaan Lingkungan Belajar Sepanjang Hayat

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung implementasi program belajar sepanjang hayat perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak masyarakat, sekolah dan keluarga akan membantu seorang individu untuk belajar lebih baik selain itu adanya penilaian akan kemajuan belajar memberikan dorongan bagi individu untuk terus belajar.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 8 dan Pasal 9 ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Disamping itu, masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lingkungan belajar yang kondusif akan sangat memengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, dukungan berbagai fihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi sebuah keniscayaan. Penciptaan lingkungan belajar yang baik, diharapkan mmpu mendorong terciptanya budaya belajar. Budaya belajar dapat muncul dengan melakukan kolaborasi yang menyenangkan efekitif dan cermat, sebab tujuan terpenting dari tujuan peadidikan adalah belajar bagairnana belajar.. Dua keterampilan yang dibutuhkan adalah belajar dengan cepat dan berpikir dengan jelas sebagai 2 kunci yang harus dimiliki oleh manusia yang hidup di abad ke 21, dilatihkan sejak anak dini usia. Hasilnva diharapkan tumbuh rasa mampu terhadap dirinya sendiri sehingga mampu rnengelola caranya dalam belajar, menguasai sebanyak-banyaknya informasi, mampu menemukan bahwa informasi itu bermanfaat untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan, serta mampu mengembangkannya secara kreatif dan produktif. Belajar harus dilandasi dengan perasaan yang menyenangkan dan bagaimana kita bisa mernbuat suatu kondisi belajar dengan berhasil dalam situasi yang menyenangkan.

#### i. Evaluasi, Akreditasi, dan Setifikasi

Penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat yang bermutu memerlukan seperangkan instrumen yang mampu memberikan jaminan mutu (quality assurance). Diantara sekian banyak indikator, peserta diskusi menyebut pentingnya pengawasan secara sistematis, program sertifikasi dan akreditasi, standar penilaian/evaluasi dan ketersediaan dana yang memadai. Tidak kalah pentingnya pula adanya upaya-upaya pengkajian melalui penelitian dan pengembangan, secara intensif dan berkesinambungan.

Salah satu bentuk program penjaminan mutu yang paling urgen adalah perlunya akreditasi pada satuan/program pendidikan sepanjang hayat yang dilakukan oleh badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan sepanjang hayat/ non formal dengan mengacu pada

standar nasional pendidikan. Sedangkan akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan independenn yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

Mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi program dan satuan pendidikan nonformal dijabarkan dalam Bab XVI. Evaluasi program pendidikan nonformal eksplisit dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Akreditasi program dan satuan pendidikan nonformal tertuang dalam Pasal 60, yang menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Setifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar, sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

#### 2. Contoh Implementasi Program Belajar Sepanjang Hayat

Seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan alokasi dana untuk pendidikan, semua daerah yang dijadikan objek studi juga melakukan upaya yang sama. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan, di antaranya:

*Pertama*, Pemberantasan buta aksara, di mana pemerintah pusat menargetkan bahwa pada akhir tahun 2009 angkat buta aksara dewasa secara nasional diperkirakan sebesar 5%. Untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama dengan cara meningkatkan alokasi dana melalui APBD provinsi/kabupaten/kota.

Kedua, Peningkatan alokasi dana untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun, di mana pemerintah pusat meluncurkan berbagai program, baik yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal mapun pendidikan nonfomal. Pada pendidikan formal dikembangkan program pemberian beasiswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, unit gedung baru, sekolah satu atap, guru kunjung, di samping program peningkatan mutu pendidikannya. Sementara pada pendidikan nonformal dilaksanakan program pendidikan keaksaraan yang lebih fleksibel dengan berbagai pendekatan yang lebih berpihak kepada peserta didik.

Ketiga, Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Seiring dengan persyaratan kualifikasi akademik dan persyaratan administratif, maka tenaga pendidik (terutama pada jalur pendidikan formal) dilakukan sertifikasi secara bertahap. Sementara pada jalur pendidikan nonformal, dilakukan dengan cara yang berbeda. Hal ini selain sistem ketenagaan yang belum mapan seperti pada pendidikan formal, tenaga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang lebih variatif, baik dilihat dari kualifikasi pendidikan

(akademik) maupun pengalaman melakukan pembelajaran. Untuk memberikan wawasan yang diperlukan oleh tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal biasanya dilakukan melalui pelatihan-pelatihan jangka pendek (*short course*), baik yang dilakukan dengan biaya APBN (dilaksanakan oleh UPT Pusat yang ada di daerah, misalnya P2PNFI dan BP-PNFI) maupun yang dibiayai oleh APBD (dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Tenaga Teknis dan Fungsional Daerah atau UPTD, BPKB dan SKB). Di samping itu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal ini dilaksanakan pula oleh perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat dan oleh kelompok-kelompok profesi, misalnya Himpunan Tenaga Pendidik dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi), Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Forum PKBM), Ikatan Pamong Belajar Indonesia, dan ikatan profesi lainnya.

Di Provinsi Jawa Barat, program pendidikan nonformal (terutama untuk pendidikan keaksaraan) mendapatkan dana alokasi yang cukup besar dari APBD provinsi, sekitar 65 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat, program pendidikan nonformal (terutama untuk pendidikan keaksaraan) mendapatkan dana alokasi yang cukup besar dari APBD provinsi, sekitar 35 milyar rupiah pada tahun 2008, dan menjadi 55 milyar rupiah pada tahun 2009 ini. Kenyataan serupa terjadi juga di tiga provinsi lain yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jumlah dana tersebut semakin besar karena didukung oleh sumber dana APBD kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan arah dan gerak pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Komitmen utama dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi maupun Rencana Strategis Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Program pendidikan yang mendukung pendidikan sepanjang hayat, terutama pendidikan nonformal di daerah tidak berbeda dengan program pendidikan yang telah dirumuskan di pemerintahan pusat. Bahkan dana-dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal hampir seluruhnya dijadikan sebagai dukungan terhadap program pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendidikan secara program masih menganut sistem kesamaan gerak dan langkah dengan pusat meskipun pendanaan untuk pembangunannya dibagti sesuai dengan kemampuan setiap daerah.

Beberapa contoh implementasi program belajar sepanjang hayat yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

# a. Program Sekolah Lapang Akselerasi Ekonomi Produktif (SL-AEP) di Kabupaten Sukabumi

SL-AEP adalah program pendidikan yang melayani warga masyarakat berlatar belakang (Pra-KS dan KS 1) untuk memperoleh pelayanan pendidikan keterampilan ekonomi produktif, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan,

dan perilaku hidup sehat sesuai dengan minat, kebutuhan, serta kesiapan dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Sekolah Lapang Akselerasi Ekonomi Produktif (SL-AEP) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan mendorong kemampuan kelompok sasaran (Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1) sehingga terampil dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang dimiliki.
- 2) Membantu kelompok sasaran ((Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1) untuk memperoleh pengetahuan dasar melalui pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan fungsional.
- 3) Sebagai upaya mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan pembinaan kepada kelompok-kelompok sasaran ((Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1) melalui pembudayaan kunjungan untuk memecahkan masalah-masalah konkrit yang dihadapi kelompok dalam pelaksanaan usaha produktif.
- 4) Memacu dinamika kelompok sebagai proses pembinaan dalam menumbuh kembangkan Akselerasi Ekonomi Produktif melalui tahapan pemberdayaan kelompok untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi maju dalam kegiatan proses produksi.
- 5) Lebih meningkatkan fungsi kelompok sebagai wahana proses belajar mengajar sekaligus membimbing anggota dalam pemanfaatan peluang peningkatan nilai tambah dan potensi sumberdaya tersedia yang dimilikinya.

Kurikulum SL-AEP memuat jenis Program Keterampilan Ekonomi Produktif dan Program Pendidikan Kesetaraan yakni Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, Program Keaksaraan Fungsional. Program Keterampilan dalam SL-AEP terdiri dari 7 keterampilan pilihan yakni Keterampilan Budidaya Jagung, Keterampilan Budidaya Kacang Tanah, Keterampilan Budidaya Domba/kambing, Keterampilan Budidaya Pepaya, Keterampilan Budidaya Kumis Kucing, Keterampilan Budidaya Kencur, dan Keterampilan Budidaya Rumput Laut. Adapun Program Kesetaraan meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA memuat sejumlah mata pelajaran wajib sesuai standar isi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Program Keaksaraan Fungsional meliputi Keaksaraan Fungsional tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat mandiri. Kurikulum SL-AEP memiliki muatan jenis keterampilan pilihan, sejumlah mata pelajaran dalam Program Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional, serta muatan materi tambahan yakni Pendidikan Moral Keagamaan (PMK), materi Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang diintegrasikan dalam mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasan Indonesia, serta materi Kewirausahaan sebagai materi tambahan pada program keterampilan ekonomi produktif.

## b. Program "Sekolah Menengah Pertama" Alternatif Qoryah Thoyyibah"di Desa Kalibening Kecamatan Tangkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Program SMP Alternatif Qoryah Thoyyibah merupakan bentuk program yang mengekspresikan misi pembebasan dan kemandirian sekolah sebagai

institusi pendidikan, berdiri sejak Juli 2003 itu. Pembebasan berarti keluar dari belenggu aturan formal yang membuat peserta didik tidak kritis dan tidak kreatif. Sedang kemandirian berarti belajar tanpa bergantung apa pun dan siapa pun. Selama ini, lembaga pendidikan formal diasumsikan selalu membelenggu peserta didik dengan sederet aturan yang tidak jelas kepentingannya buat peserta didik, seperti baju seragam, sepatu seragam, dan masuk harus jam tujuh pagi. Dengan kata lain, sistem pendidikan di Indonesia yang telah berlangsung selama ini dipandang belum membebaskan. Peserta didik lebih banyak diperlakukan seperti robot; harus nurut, ikut kurikulum, sarat kekerasan, dan kadang sekadar mengejar nilai bukan proses.

Pengelola SMP QT membebaskan para peserta didiknya belajar menurut keinginan. Sumber pembelajaran telah tersedia tanpa batas. Bahkan pada persoalan hidup yang muncul setiap hari. Semua peserta didik yang dilengkapi fasilitas internet 24 jam ini tidak dikutip uang pangkal, uang seragam, uang buku, dan uang gedung. Untuk menyiasati kekurangan ruang belajar, bilik-bilik milik rumah di sekitar kediaman pengelola disulap menjadi kelas yang dipakai bergiliran.

Program di sekolah ini terinspirasi sistem pesantren klasik dan ide-ide pendidikan nonformal yang tidak bergantung pada tempat dan aturan formal. Biaya operasional sekolah yang semula hanya menempati teras dan garasi sang kepala sekolah ini diambil dari anggaran yang kecil untuk pendidikan SMP terbuka dan kocek wali murid. Setiap anak yang mau masuk, wali murid, dan pengelola bertemu untuk menentukan besaran kontribusi yang disanggupi. Tidak harus sama antara satu anak dan yang lainnya. Kebersahajaan itu dirancang sebagai perlawanan terhadap komersialisasi lembaga pendidikan formal.

Pada tahun pertama berdiri, sekolah ini diikuti 12 anak. Kini memasuki tahun keempat, SMP QT telah memiliki delapan pendamping (guru) dan 99 siswa dari kelas I sampai kelas IV. Sebagian besar peserta didiknya anak buruh tani dan pedagang pasar dengan penghasilan Rp 15.000 sampai Rp 20.000 sehari. Bisa dibayangkan jika mereka harus membayar uang pangkal hingga Rp 700.000, dan untuk SPP per bulan Rp 35.000 sampai Rp 40.000 . Belum lagi uang buku, uang saku, dan macam-macam lagi, tentu bagi mereka belajar sekolah adalah barang yang sangat mahal. Kini peminat sekolah ini membeludak, tidak hanya dari Salatiga tapi juga daerah lain, bahkan dari Jakarta. Sekolah yang terdaftar di Diknas Kota Salatiga sebagai pendidikan luar sekolah (PLS) ini, juga membebaskan muridnya untuk mengikuti atau tidak ujian nasional (UN).

Peserta didik kelas III SMP QT, telah melahirkan karya ilmiah yang mereka sebut disertasi. Disertasi itu sebagai tugas akhir, karena program pada lembaga ini sepakat tidak ikut Ujian Nasional. Beberapa karya ilmiah ("disertasi") yang dibuat oleh peserta didik diantaranya membuat briket dari sampah dan bambu kering, meneliti bio-urine sebagai pengganti pupuk urea, dan lain-lain. Sejumlah novel pop dan kumpulan puisi yang diproduksi murid sekolah ini juga sudah diterbitkan Penerbit Matapena, Yogyakarta. Menyusul kumpulan puisi, katalog lukisan, serta presentasi tertulis dan VCD berbagai mata pelajaran. Kini murid-murid sekolah itu sedang mempersiapkan sebuah album musik dan film hasil ciptaan mereka.

Program di sekolah ini mencoba menawarkan pendidikan bermutu dan murah. Bermutu bukan sekadar peringkat tinggi, tapi yang lebih penting mereka memberdayakan peserta didik dalam menghadapi realitas kehidupan sekitar. Metode pembelajaran SMP QT terfokus kepada peserta didik, bukan guru. Dalam pendekatan seperti ini, anak-anak diberi kebebasan untuk belajar dari mana saja, apa saja, dan tidak harus di kelas. Semuanya diserahkan kepada anak didik tanpa terkungkung satu sumber belajar.

Jika kita berkunjung ke sekolah ini, akan terlihat sebagian besar tempat belajar kosong pada jam pelajaran. Ternyata para murid sedang asyik belajar di sawah, ladang, atau pinggir sungai. Di dalam maupun di luar kelas, guru yang biasa dipanggil pendamping atau fasilitator dilarang mengarahkan proses pembelajaran. Pendamping hanya boleh mendengar dan menjaga agar kegiatan kelas tetap kondusif.

## c. Program Pendidikan Kesetaraan bagi Masyarakat Daerah Terpencil Melalui Pemanfaatan Radio Komunitas di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Program ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala yang cukup mengganggu kinerja penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan yakni sulitnya memaksimalkan layanan pendidikan bagi kelompok-kelompok sasaran yang kurang memiliki kesempatan untuk akses secara langsung terhadap program-program pendidikan non formal, khususnya program Paket A dan Paket B. Padahal di satu sisi, komunitas ini memiliki *kebutuhan belajar yang cukup tinggi*, terutama kaitannya dengan peningkatan kualifikasi pendidikan minimal SLTP dan bahkan SMA yang dipersyaratkan oleh perusahaannya tempat bekerja. Beberapa hal yang menjadi persoalan keterbatasan akses adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak yang cukup jauh antara domisili peserta didik dengan institusi penyelenggara pendidikan non formal, akibat faktor geografis yang kurang menguntungkan;
- 2) Sebagian besar sasaran didik adalah pekerja dan pencari nafkah (petani, wiraswasta, dan buruh pabrik) yang pulangnya baru sore hari,
- 3) Waktu belajar pada siang hari yang berbenturan dengan waktu bekerja atau mencari nafkah, kurang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara tatap muka (face to face).

Pemanfaatan Radio Komunitas Pemanfaatan radio komunitas untuk perluasan pendidikan kesetaraan ini secara umum betujuan untuk membantu warga belajar atau kelompok masyarakat yang tidak terlayani kebutuhan belajarnya pada jalur non formal secara reguler-konvensional. Dalam konteks yang lebih spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat terpencil dan atau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap program-program pendidikan non formal.
- 2) Memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran program Paket A setara Sekolah Dasar (SD) yang mengacu pada kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan.

3) Memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran program Paket B setara SLTP yang mengacu pada kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Karakteristik sasaran program pembelajaran Paket A dan Paket B melalui pemanfaatan radio komunitas ini adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, akibat kondisi geografis yang relatif terpencil, keterbatasan waktu, biaya, dan budaya (*culture*).

Kelompok sasaran seluruhnya berada di kawasan Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Mata pencaharian masyarakat sasaran sebagian besar adalah petani, buruh/karyawan, ibu rumah tangga, dan kelompok sasaran lainnya yang tidak terlayani kebutuhan belajarnya pada jalur pendidikan formal. Secara spesifik kelompok sasaran pembelajaran melalui radio komunitas ini adalah:

- (1) Drop out (DO) Sekolah Dasar
- (2) Putus Jenjang SD
- (3) Drop out (DO) SLTP

Kurikulum pembelajaran pendidikan kesetaraan melalui radio komunitas ini mengikuti rasionalisasi sebagai berikut:

### **Program Paket A:**

Berdasarkan kurikulum yang berlaku, jam belajar program Paket A adalah 680 jam/tahun atau 180 hari/tahun atau 3,8 jam/hari atau 34 minggu/tahun dengan muatan 30 SKS/semester, dengan durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Melihat komposisi waktu yang ditetapkan, waktu efektif pembelajaran melalui radio setiap semesternya adalah 340 jam/semester atau, 90 hari/semester atau, 17 minggu/semester, dengan alokasi SKS sebanyak 30 SKS dalam durasi 40 menit setiap 1 jam pelajaran, dan mengudarakan materi pembelajaran selama 3,8 jam/hari.

#### **Program Paket B:**

Merujuk pada kurikulum yang berlaku, jam belajar program Paket B adalah 816 jam/tahun atau 180 hari/tahun atau 4,5 jam/hari atau 34 minggu/tahun dengan muatan 34 SKS/semester dengan durasi setiap 1 jam pelajaran adalah 40 menit. Berdasarkan komposisi waktu yang ditetapkan di atas, waktu efektif pembelajaran melalui radio setiap semesternya adalah 408 jam/semester atau, 90 hari/semester atau, 17 minggu/semester, dengan alokasi SKS sebanyak 34 SKS dalam durasi 40 menit setiap 1 jam pelajaran, dan mengudarakan materi pembelajaran selama 4,5 jam/hari.

## d. Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidupa pada PKBM Inayah di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makasar.

Visi dan misi PKBM Inayah masih ditunjukkan dengan penyelenggaaan progran PNF, yang sampai dengan tahun 2009 ini, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Inayah tetap eksis mengembangkan pendidikan di masyarakat. Bahkan, PKBM yang dipimpin oleh Idham, S.E ini memiliki prestasi

yang cukup membanggakan. Salah satu prestasi yang diraihnya adalah juara dua PKBM ditingkat Sulawesi Selatan. Idham, mengungkapkan, eksistensinya dalam melaksanakan semua program PNF di PKBM tidak terlepas dari dukungan Dinas Pendidikan yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan termasuk memberikan pembinaan-pembinaan yang berkesinambungan terhadap program PNF di PKBM Inayah.

Salah satu program unggulan PKBM ini adalah program pendidikan keaksaraan, karena disamping mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembelajaran, program ini juga cukup memiliki keunggulan dalam hal jenis keterampilan VCO yang diintegrasikan.

Jumlah warga belajar pendidikan keaksaraan (sampai dengan bulan Maret 2009) yang masih aktif dalam proses pembelajaran pendidikan keaksaraan tingkat dasar sebanyak 40 orang yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan Kota Makasar. Sedangkan jumlah warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, yang masih berpartisipasi dalam aktivitas pembelajarannya, sebanyak 20 orang, yang juga pengelolaannya didanai oleh dan dekonsentrasi Kota Makasar tahun anggaran 2009, serta dikelola oleh 4 orang pendidik/tutor, dengan kualifikasi pendidikan 1 orang S1 dan 3 orang lulusan SMA. Namun, keempat orang tutor tersebut pernah mengikuti pelatihan tutor pendidikan keaksaraan, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota Makasar maupun oleh BP-PNFI Makasar. Sehingga, secara umum dapat dikatakan mereka telah memahami teknis, prinsip dan metode pembelajaran pada program pendidikan keaksaraan

Substansi pembelajaran untuk pendidikan keaksaraan tingkat dasar, yang dijadikan muatan program belajar (tahun 2009) adalah yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan yang dielaborasikan dengan pendidikan vokasional, pembuatan VCO (Virgin Coconout Oil) dan pembuatan kue-kue kering sebagai ragi belajarnya. Sedangkan, program belajar bagi warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, adalah menjahit dan pengemasan serta teknik pemasaran VCO.

Pembelajaran bagi warga belajar tingkat dasar dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu setiap hari minggu, pukul 15.30 s/d 17.00 WITA. Sedangkan untuk warga belajar tingkat lanjutan, pembelajarannya dilakukan setiap hari Sabtu dengan waktu dan alokasi jam yang sama dengan durasi pembelajaran pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan. Mengenai metode pembelajaran yang dominan dipergunakan oleh tutor dalam pendidikan keaksaraan pada kedua tingkatan ini, adalah metode SAS, Transliterasi, Belajar dari bahan bacaan sekitar dan praktek hasil belajar.

Nara sumber teknis yang terlibat dari pembelajaran keaksaraan berbasis kecakapan hidup ini, adalah tutor, pengelola dan warga belajar yang mempunyai kompetensi terhadap jenis keterampilan life skills tertentu, yang menjadi kebutuhan belajar warga belajar PNF di PKBM Inayah.

Biaya penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan berbasis kecakapan hidup adalah bersumber dari biaya mandiri pengelola PKBM. Hal ini disebabkan, sampai dengan 2009 ini, sejak dari awalnya PKBM Inayah berdiri, belum pernah mendapatkan bantuan dana atau bantuan lainnya dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kota bahkan dari BP-PNFI Makasar sekalipun. Dari sini, dapat terlihat kemandirian PKBM Inayah dalam kontribusi dan partisipasinya dalam program PNF di Kota Makasar.

Secara umum, sasaran strategis penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan di PKBM Inayah, adalah para ibu rumah tangga yang: a) tidak mempunyai keahlian dalam bidang keterampilan vokasional, b) ibu rumah tangga yang buta aksara dan c) pemuda/i yang tidak sempat mengecap bangku SMP atau SMA, dikarenakan alasan ekonomi keluarga, d) pemuda/i yang belum mempunyai pekerjaan (pengangguran).

Program ini memiliki dampak langsung terhadap beberap hal, diantaranya: (1) adanya peningkatan dalam kemampuan Calistung (WB Pendidikan keaksaraan); (2) mampu meningkatkan ekonomi keluarga, karena sudah mampu memproduksi dan menjual hasil belajar (terutama VCO) sendiri; (3) lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat; (4) melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas/perguruan tinggi swasta; (5) mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan, serta (6) membuka usaha mandiri di rumahnya masing-masing.

# e. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain Bina Ilmu di Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Program Pendidikan Anak Usia dengan besaran satuan pendidikan kelompok bermain dan taman penitipan anak. Namun demikian upaya perluasan di setiap daerah semakin dikembangkan, misalnya dengan memperkuat posyandu untuk kemudian ditingkatkan menjadi Pos PAUD, penguatan lembaga sosial lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini; contoh paling mutakhir dari penyelenggaraan program PAUD adalah program PAUD yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Ilmu di Kabupaten Semarang. Program PAUD Bina Ilmu termasuk program yang cukup baik dan bermutu, mengingat kelengkapan dari beberapa komponen pendukungnya, dilihat dari perspektif pengelolanya, pamong belajar/fasilitator/tutor, program belajar, sarana dan prasarana, hasil belajar, warga belajar, ragi belajar, kelompok belajar, panti belajar, ketersediaan dana belajar.

Kelompok bermain merupakan wadah pembelajaran pengembangan potensi dalam upaya pembentukan kepribadian dasar manusia yang handal guna menciptakan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan program kelompok bermain ini didasarkan atas pertimbangan bahwa usia 2-4 tahun merupakan masa peralihan dari masa bayi ke masa kanak-kanak. Masa usia dini merupakan masa yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak usia dini selalu serba ingin tahu, banyak bertanya, keras kepala, aktif, selalu ingin, mencoba hal-hal yang baru menurut dorongan yang timbul dalam dirinya, asuhan, bimbingan. Dukungan dan komunikasi dari orang tua yang baik merupakan hal yang sangat diperlukan anak dalam usia dini.

Kelompok bermain Bina Ilmu merupakan satu wadah pendidikan bagi anak usia 2-4 tahun yang hadir dengan idealisme mewujudkan sebuah pendidikan yang mengembangkan anak sebagai subjek pendidikan secara utuh mulai dari usia dini sesuai dengan visi dan misi kelompok bermain Bina Ilmu.

Secara umum program pendidikan di kelompok bermain Bina Ilmudisusun untuk mengembangkan bidang-bidang sebagai berikut:

Tabel 2 Pengembangan Bidang-Bidang dalam Program Kober Bina Ilmu

Bidang	Contoh	
Keterampilan	Mengasah motorik halus dan kasar anak, daya cipta, daya fikir dan bahasa.	
• Fisik	Pengembangan kesadaran pentingnya kebersihan, kesehatan serta kebugaran pada diri anak.	
<ul><li>Kemampuan interaksi sosial</li><li>Karakter</li></ul>	<ul> <li>Pengembangan kemampuan bersosialisasi, berkomunikasi, solidaritas, dan nilai-nilai keagamaan.</li> </ul>	
	<ul> <li>Mengembangkan keberanian pada diri anak, sportifitas, tanggung jawab dan kerjasama.</li> </ul>	

Berbagai upaya pendidikan tersebut tetap dikemas dalam dunia anak-anak usia dini, yang mengutamakan permainan dalam kegiatannya, sehingga program yang disusun mengacu kepada konsep belajar sambil bermain. Lingkungan dan fasilitas tempat belajar tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, kegembiraan, kenyamanan dan keleluasaan bagi anak dalam proses pendidikannya.

Untuk mewujudkan tujuan dan konsep pembelajaran diatas, "Bina Ilmu" menuangkannya dalam aktivitas sebagai berikut :

- 1. Kegiatan rutin harian yang telah dikonsultasikan kepada ahli pendidikan anak.
- 2. Program pemantauan anak oleh psikolog, dokter dan dokter gigi.
- 3. Kegiatan bermain keluar (outdoor program) sesuai dengan tema yang sedang dibahas.
- 4. Kegiatan penunjang lain seperti pertemuan rutin dengan orang tua (parenting), panggung anak dan pameran.

Adapaun kegiatan rutin anak-anak dikelompok bermain "Bina Ilmu" sehari-hari, diantaranya sebagai berikut :

- 1. Kegiatan inti harian berupa aktifitas dalam kelompok.
- 2. Bermain bebas didalam dan diluar ruangan.
- 3. Makan bersama yang tujuannya untuk melatih kemandirian dan kebersamaan anak.
- 4. Latihan aktifitas sehari-hari.

## f. Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Komunitas di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

TBM atau dikenal dengan Taman Bacaan Masyarakat telah ada sejak tahun 50-an yang dikenalkan oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dengan nama Taman Pustaka Rakyat (TPR). TPR di kelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu; Tingkat A sebagai TPR tingkat propinsi, tingkat B sebagai TPR tingkat kabupaten, dan Tingkat C sebagai TPR tingkat kecamatan.

Selanjutnya, keberadaan TPR dipertegaskan lagi oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Pendidikan Masyarakat Depdiknas pada tahun 1992 yang dikenal dengan nama Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung program keaksaraan sehingga para aksarawan baru (warga belajar/masyarakat yang baru mengenal baca, tulis dan hitung secara sederhana) mendapat layanan bahan bacaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan membaca sehingga mereka tidak kembali menjadi buta aksara.

Dewasa ini, TBM sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat merupakan potensi dalam memberdayakan warga belajar khususnya dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat (Depdiknas, 2007), bahwa TBM belum menjalankan fungsinya secara optimal karena berbagai faktor, antara lain; pengelola TBM yang kurang kreatif, kurang terampil, dan kurang berdedikasi.

Program ini juga masih menjadi domain pusat, di mana program yang diluncurkan belum mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, meskipun pada tahun 2007 pemerintah pusat telah memberikan stimulan berupa mobil untuk taman bacaan kepada pemerintah kabupaten/kota, di mana dana operasionalnya hendaknya dialokasikan oleh APBD kabupaten/kota. Di beberapa daerah yang menjadi lokasi penelitian, program pengembangan budaya baca ini lebih dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu perpustakaan komunitas.

## g. Program Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan yang Rentan Masalah Sosial dan Ekonomi.

Program pendidikan dan pemberdayaan perempuan, merupakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan, khususnya mereka yang termarginalkan, baik karena faktor kultur maupun struktur. Progam pendidikan perempuan difokuskan pada dua hal, yakni peningkatan kesadaran perempuan akan hak-hak dasar kemanusiaan (HAM) dan peningkatan kemampuan/kecakapan perempuan yang dapat mendorong perempuan dapat berkiprah secara maksimal daalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Program pendidikan perempuan sementara ini masih menjadi domain pemerintah pusat, dalam arti bahwa pemerintah daerah belum ada yang menganggarkan dana untuk program yang sama dengan pemerintah pusat.

Tujuan Khusus yang ingin dicapai untuk pemberberdayaan perempuan yaitu:

- a. Mamahami nilai nilai hak asai manusia (HAM)
- b. Memahami ilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban setiap perempuan

- c. Memiliki keterampilan memadai dalam membantu meningkatkan pendapat Keluarga.
- d. Memiliki kemampuan untuk mengorganisasi dan memobilisasi; partisipasi dalam organisasi komunitas perempuan.

Substansi materi pada program pendidikan dan pemberdayaan perempuan meliputi:

- a. Bidang Keterampilan
  - 1) Pengenalan alat
  - 2) Pengenalan Teknik-teknik, dan cara merias pengantin
  - 3) Pengenalan karakteristik setiap orang
  - 4) penguatan Materi dan pengulangan
  - 5) Kegiatan Praktek
- b. Bidang Umum-Integratif
  - 1) Gender dalam kehidupan rumah tangga
  - 2) Pengelolaan ekonomi keluarga berwawasan gender
  - 3) Gender dan kehidupan demokrasi dalam keluarga
  - 4) Hak Asasi Manusia (HAM) dalam keluarga
  - 5) Hak-hak Perempuan, bahaya trafficking dan Anak
- c. Bidang Penunjang
  - 1) Pelatihan fasilitator dan nara sumber teknis
  - 2) Pelatihan pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif

# h. Program Kursus Wirausaha Desa dan Kursus Wirausaha Kota (KWD & KWK).

Program ini merupakan program yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar untuk kemudian dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan berekonomi. Program ini merupakan program yang bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengembangan sikap dan keterampilan kewirausahaan di pedesaan maupun di perkotaan. Program ini berjalan hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk pada lima provinsi lokasi penelitian.

Program kursus ini penyelengaraannya sudah sukup melembaga dan sebenarnya sudah lebih banyak yang berdiri sendiri (establish). Program ini diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sudah lama berdiri di masyarakat. Namun demikian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan output peserta didik, pemerintah memberikan rambu-rambu penyelenggaraan dan pembinaan, baik dalam pendanaan maupun substansi program. Keseluruhan program tersebut terbingkai dalam satuan pendidikan di antaranya adalah PKBM, Yayasan, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Peduli Perempuan, dan lainnya.

## i. Program Kelompok Belajar Usaha Budidaya Ikan Jaring Terapung di Pinggiran Sungai Kapuas Kota Pontinak Provinsi Kalimantan Barat

Program kelompok belajar usaha yang dikembangkan di di PKBM Sejahtera Kota Pontinak adalah budiaya ikan melalui pengelolaan jaring terapung di pinggiran Sungai Kapuas. Program ini berjalan cukup baik dan efektif sehingga

memperoleh simpati luas dari masyarakat. Warga masyarakat sekitar sungai yang pada awalnya pesimistis, setelah melihat perkembangan dan keberhasilan kelompok ini menjadi ikut simpatik dan bergabung dengan kelompok ini.

Dilihat dari perkembangan anggotanya, KBU ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari jumlah anggota yang hanya 20 orang, kini sudah mencapai 200 orang lebih dengan pendapat setiap bulannya mencapai 2 s.d 5 juta rupiah. Agar pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran hasil budidaya ikan ini berjalan baik dan terorganisir, maka dibentuklah asosiasi petani ikan sungai Kapuas yang beranggotakan 200 orang lebih. Produk budidaya ikan dipasarkan ke beberapa pasar swalayan dan para pedagang kecil di sekitar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

# 3. Dampak Program Belajar Sepanjang Hayat terhadap Pemberdayaan Individu dan Masyarakat Dilihat dari Konteks Sosial dan Ekonomi.

Salah satu indikator keberhasilan program pendidikan nonformal adalah meningkatnya kebermaknaan diri dalam kehidupan dirinya, keluarganya dan lingkungan masyarakatnya. Kebermaknaan diri berarti memiliki kemampuan untuk menjadi diri sendiri, bersifat mandiri dan memiliki kemampuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada lulusan, diperoleh keterangan bahwa seluruh lulusan lembaga pendidikan merasakan bahwa program belajar sepanjang hayat memberikan makna dalam kehidupannya. Makna tersebut dapat dilihat pada;

- 1. Perubahan pengetahuan dan kemampuan yang dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan kepada pendidikan lanjutan (terutama untuk pendidikan keaksaraan).
- 2. Perubahan orientasi hidup yang lebih fungsional (terutama untuk pendidikan keaksaraan).
- 3. Perubahan berekonomi dan berkehidupan yang layak, terutama untuk lulusan program kursus
- 4. Perubahan pengetahuan tentang hak-hak dasar hidup dan kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa (terutama pendidikan pemberdayaan perempuan).

Pada umumnya pencapaian yang diperoleh tersebut terjadi karena adanya keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai oleh para peserta didik, di mana pada umumnya tujuan sangat dipengaruhi oleh jenis program pendidikan nonformal yang dikembangkan. Pada program pendidikan kesetaraan, peserta didik pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang setara dengan pendidikan formal dan sangat berharap untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Peserta didik pada program pendidikan keaksaraan lebih fokus bertujuan untuk memiliki kemampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari, di samping peningkatan ketrampilan hidup yang lebih fungsional. Tujuan peserta didik mengikuti program pendidikan kursus (KPP, KWD, KWK), pada umumnya bertujuan untuk mempercepat mendapatkan pekerjaan dan ekonomi.

Kebermaknaan program belajar sepajang hayat menjadi dasar program ini diminati oleh peserta didik. Kebermaknaan tersebut dilihat dari empat hal, yaitu;

Pertama, kesesuaian program dengan kebutuhan belajar yang dirasakan. Program belajar sepanjang hayat yang selama ini diikuti selain menyajikan program reguler juga menyisipkan progam untuk keahlian yang diharapkan. Pada beberapa kasus, program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tidak terlepas dari program pendidikan kecakapan hidup yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

*Kedua*, kemudahan (fleksibilitas) untuk diperoleh dan ketidakkakuan. Program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan pada lembaga pada umumnya dapat diakses oleh peserta didik kapan saja tanpa mengenal batas waktu yang kaku, meskipun pada umumnya penyelesaiakan program memiliki batasan waktu. Hal ini memudahkan peserta didik dalam menyesuaikan waktu belajar yang dimiliki.

*Ketiga*, pada umumnya program belajar sepanjang hayat dapat dijangkau lebih mudah dan lebih dekat. Ada kalanya program belajar sepanjang hayat dilaksanakan di tempat tinggal peserta didik, terutama untuk program pendidikan keaksaraan dan program pendidikan perempuan, sementara program yang membutuhkan dukungan sarana yang lebih lengkap biasanya dilaksanakan di lembaga tersebut atau pada lembaga mitra yang memiliki sarana yang dibutuhkan.

*Keempat*, berorientasi kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masa kini dan mempersiapkan kemampuan untuk masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan banyaknya peserta didik yang merasa terbantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi saat ini terutama yang berkaitan dengan pemerolehan pekerjaan yang didasarkan atas ketrampilan tertentu atau persoalan-persoalan sosial budaya lainnya.

Kebermaknaan di atas berdampak pada sikap dan perilaku serta harapan yang lebih positif dari peserta didik, baik yang menyangkut diri sendiri maupun yang menyangkut sistem sosial budaya. Sikap, perilaku dan harapan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu;

Pertama, perubahan pada kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus menerus. Pada umumnya peserta didik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan hasil belajar yang diperoleh pada program belajar sepanjang hayat melalui pembiasaan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama terjadi pada pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

*Kedua*, perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar. Peserta didik pada program belajar sepanjang hayat memiliki rasa percaya diri untuk dapat hidup dan menatap masa depan yang lebih baik. Pada umumnya mereka merasa dapat menemukan peluang untuk dapat hidup lebih baik atas dasar kemampuan yang dimiliki melalui program belajar sepanjang hayat.

*Ketiga*, perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimis. Perubahan ini ditandai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik, melahirkan dan memiliki generasi yang lebih baik, dan menjadi pendorong terhadap anggota keluarga dan masyarakat lain untuk memanfaatkan program belajar sepanjang hayat.

Program belajar sepanjang hayat juga pada gilirannya harus mampu memberikan efek positif dalam berekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan belum ditemukan secara pasti nilai pertambahan ekonomi secara kuantitatif yang dapat dihitung. Namun demikian, lulusan program pendidikan nonformal mengaku bahwa terjadi perubahan positif dalam kehidupan berekonomi. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator kunci, yaitu;

- 1) Diperolehnya pekerjaan baru, meskipun pada beberapa kasus pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara swadaya atau berkelompok dalam sistem pembimbingan dari lembaga pendidikan. Kasus tersebut nampak pada usaha diversifikasi agroindustri di Jawa Barat, di mana lulusan pendidikan nonformal diwadahi dalam kelompok usaha ekonomi produktif.
- 2) Meningkatkan pendapatan ekonomi dalam pekerjaan yang sama yang diakibatkan oleh kepuasan pelanggan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang sama. Kondisi ini lebih menonjol terjadi pada program pendidikan kecakapan hidup dalam berbagai jenis dan ragam program, seperti perbengkelan, pertanian, budidaya ikan, pengelolaan hutan tanaman produksi, jasa dan jenis kecakapan hidup lainnya...

Dampak paling nyata dari program belajar sepnjang hayat terlihat dari uraian kasus yang terjadi di PKBM Inayah Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa (1) terdapat 13 orang lulusan Paket C yang melanjutkan pendidikannya ke universitas swasta di Makasar; (2) 20 orang lulusan pendidikan life skills, 13 orang lulusan pendidikan keaksaraan dan 17 orang lulusan Paket C yang membuka usaha pembuatan VCO secara mandiri di rumahnya masingmasing (home industri); (3) 13 orang warga belajar pendidikan life skills, 8 orang lulusan pendidikan keaksaraan dan 14 orang lulusan paket C yang membuka usaha menjahit.

Dalam konteks program pendidikan kecakapan hidup, proses belajar dapat ditempuh dengan berbagai cara. Misalnya, seseorang yang ingin mempelajari teknik-teknik membuat barang kerajinan tangan, memasarkan hasil produksi, dan mengelola unit usaha maka mungkin ia dapat menempuh langkah-langkah: (a) menyaksikan atau mengamati orang lain melakukan kegiatan tertentu yang diinginkan, (b) membantu orang lain yang membuat barang atau melakukan usaha, (c) ikut serta bersama orang lain yang melakukan kegiatan, dan (d) mengerjakan sendiri pekerjaan kegiatan tertentu. Melalui salah satu atau beberapa langkah tersebut maka ia dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan atau aspirasinya untuk mencapai kepuasan dalam peningkatan diri. Aspek tingkah laku inilah yang perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik karena perubahan aspek tingkah laku tersebut akan mempengaruhi peningkatan taraf hidup dan kehidupan peserta didik.

Proses belajar sepanjang hayat mampu menempatkan nilai-nilai kecakapan hidup (*life skills*) sebagai muatan strategis yang terintegrasi dengan materi belajar sepanjang hayat. Nilai kecakapan hidup dan kecakapan sosial dalam dunia belajar sepanjang hayat akan sangat baik bila dikembangkan melalui sistem kemitraan (*partnership system*) dengan melibatkan orangtua, gubernur, organisasi profesi, kelompok minat dan industri. Dalam gambar berikut terlihat ada sepuluh daftar kecakapan hidup paling atraktif bagi pengembangan wawasan dan nilai belajar sepanjang hayat.

Pentingnya belajar dari dan dalam dunia kehidupan nyata tidak terbatas pada

upaya untuk memiliki dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan aspirasi saja. Lebih jauh dari itu kegiatan belajar mencakup segi-segi kehidupan yang lebih luas seperti nilai keagarnaan, hubungan sosial, adat istiadat, dan normanorma yang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan belajar diperlukan pula untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus berkembang dalam kehidupan. Dengan perkataan lain kegiatan belajar sepanjang hayat adalah untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **Temuan Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belajar sepanjang hayat merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam beberapa produk kebijakan pendidikan yang mengkonseptualisasi belajar sepanjang hayat menjadi prinsip dan asas penyelenggaraan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam berbagai jenis, jenjang dan program pendidikan.

Konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan di Indonesia, masih berupa penggalan-penggalan yang bersifat parsial dan dalam bentuknya yang beragam. Ada yang secara eksplisit menggunakan terminologi program pendidikan atau belajar sepanjang hayat, selebihnya menggunakan terminologi lain yang biasa digunakan dalam pendidikan nonformal.

Beberapa temuan penting yang berkaitan dengan konseptualisasi belajar sepanjang hayat dalam produk kebijakan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat

Prinsip belajar sepanjang hayat merupakan aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik pada satuan dan program pendidikan. Karena filosofinya setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam konteks penelitian ini, program belajar sepanjang hayat lebih sering diposisikan dalam kerangka berfikir jalur pendidikan, baik formal, nonformal dan informal. Belajar sepanjang hayat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan nonformal, telah memberikan arah dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan program pendidikan nonformal.

#### 2. Jenis Program dan Satuan Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya belajar sepanjang hayat pada daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian menjadikan bervariasinya program belajar sepanjang hayat yang dikembangkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pembuat kebijakan di daerah yang melaksanakan sesuai dengan acuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan non formal dari pusat. Keberagaman program pada dasarnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap daerah yaitu pada satuan pendidikan sepanjang hayat yang diteliti (PKBM), program yang

dikembangkan relatif sama khususnya pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), antara lain: (a) Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A Setara SD, Paket B Setara SLTP dan Paket C Setara SMU, (b) Pendidikan keaksaraan fungsional, (c) Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill), (d) Pengembangan Minat Baca melalui Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Komunitas; (e) Kursus dan Pelatihan Keterampilan, (f) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (g) Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan; (h) Pendidikan Kewirausahaan/Kelompok Belajar Usaha; (i) Pendidikan Kepemudaan, Rekreasi dan Olahraga/Kelompok Belajar Olahraga (KBO); (j) Pengembangan Program Magang.

## 3. Peranserta dan Kemitraan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat

Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat dari pemerintah dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan, oleh jajaran dinas pendidikan, yang berfokus pada tiga jalur pendidikan, meliputi pendidikan formal, pendidikan informal, dan non formal. Pada level provinsi yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi, sedangkan untuk tingkat Kabupaten yang memberikan pembinaan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten. Pada Tingkat kecamatan pelaksana teknis dalam pembinaan yaitu Penilik Pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun Pendidikan Luar Sekolah. Dalam menjalankan tugas penilik PLS dibantu oleh Tenaga Lapangan Dikmas (TLD). Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan (NGO) dalam penyelenggeraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber belajar, pelaksana, dan pengguna pendidikan.

Kemitraan dalam pengembangan pendidikan sepanjang hayat dapat dinilai strategis untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi dan merumuskan model kerjasama yang harmonis dan strategik diantara para pelaku program. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks peningkatan perekonomian masyarakat model kemitraan diperlukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam program pemberdayaan masyarakat.

# 4. Struktur Kelembagaan, Anggaran, dan Ketenagaan pada Program Belajar Sepanjang Hayat

Pengembangan dan implementasi program belajar sepanjang hayat pada jalur pendidikan nonformal dan informal diselenggarakan pada lembaga-lembaga teknis, baik pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat secara luas. Visi kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal adalah "terwujudnya manusia Indonesia pembelajar sepanjang hayat". Anggaran atau Pembiayaan pendidikan nonformal menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendidik pada program belajar sepanjang hayat harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Disamping itu tenaga

pendidik pada program belajar sepanjang hayat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Tenaga kependidikan pada program pendidikan kesetaraan sekurangkurangnya terdiri dari pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. Sedangkan tenaga kependidikan lembaga kursus dan pelatihan keterampilan yang menuntut adanya pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

### 5. Substansi Program Pembelajaran dan Sasaran Langsung

Substansi pokok program belajar sepanjang hayat, terutama pada program pendidikan kesetaraan (Program Paket A, Paket B, dan Paket C) mencakup kelompok mata pelajaran sebagai berikut: Agama dan Akhlak Mulia, Kewarganegaraan dan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Estetika, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kurikulum program belajar sepanjang hayat dikembangkan prinsip-prinsip: (a) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan; (b) Beragam dan terpadu; (c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (d) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (e) Menyeluruh dan berkesinambungan; (f) Belajar sepanjang hayat; (g) Seimbang antara kepentngan nasional dan daerah; (h) Tematik; (i) Partisipatif

## 6. Metodologi Pembelajaran dan Mekanisme Penyampaian

Program belajar sepanjang hayat diselenggarakan dalam berbagai modus, bentuk, dan cakupn yang didukung oleh sarana dan layanan bekajar serta system penillaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Metode yang dipergunakan dalam program belajar sepanjang hayat disesuaikan dengan substansi materi dari program yang dikembangkan. Pada program kesetaraan metode yang dipergunakan relatif sama dengan pendidikan formal hanya memiliki memiliki beberapa perbedaan yaitu lebih banyak metoda yang dipergunakan untuk belajar mandiri karena waktu belajar yang relatif lebih singkat apabila dibandingkan dengan pendidikan formal. Adapun yang memiliki kekhasan adalah metoda yang dikembangkan untuk pendidikan keaksaraan fungsional, dimana pembelajaran dilaksanakan secara tematik sehingga warga belajar tidak merasa bosan dan jenuh. Sedangkan metoda yang dipergunakan untuk program life skill lebih banyak mempergunakan demonstrasi dan simulasi untuk materi pelajaran praktek dan cermah untuk mata pelajaran teori. Inti pembelajaran adalah transfer dan tansformasi dengan mengacu pada pola just in time dan just in case. Proses pembelajaran berbasis induktif, tematik dan berbasis kecakapan hidup melalui modus:

- 1) Belajar mandiri,
- 2) Belajar dengan tutorial tatap muka/classroom based,
- 3) Belajar melalui magang
- 4) Belajar secara berkelompok.

#### 7. Jaringan antara Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal

Belajar sepanjang hayat merupakan proses kontinum dari elemen-elemen yang saling berkaitan (interdependent), yang dilandasi oleh kebutuhan individu dalam pendidikan sepanjang hidupnya. Proses belajar sepanjang hayat yang merentang dari pendidikan formal, non formal hingga informal. Kedudukan ketiga jalur tersebut dalam perspektif undang-undang jelas setara dan tidak menunjukkan hirarki kualitas, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal-hal lain yang berkenanaan dengan jaringan (linkage) antara pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah program pindah jalur. Program pindah jalur dalam rangka kesetaraan merupakan hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

#### 8. Penciptaan Lingkungan Belajar Sepanjang Hayat

Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung implementasi program belajar sepanjang hayat perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak masyarakat, sekolah dan keluarga akan membantu seorang individu untuk belajar lebih baik selain itu adanya penilaian akan kemajuan belajar memberikan dorongan bagi individu untuk terus belajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan sangat memengaruhi kualitas proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, dukungan berbagai fihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi sebuah keniscayaan. Penciptaan lingkungan belajar yang baik, diharapkan mmpu mendorong terciptanya budaya belajar. Budaya belajar dapat muncul dengan melakukan kolaborasi yang menyenangkan efekitif dan cermat, sebab tujuan terpenting dari tujuan peadidikan adalah belajar bagairnana belajar.

#### 9. Evaluasi, Akreditasi, dan Setifikasi

Evaluasi program belajar sepanjang hayat dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Akreditasi program dan satuan pendidikan sepanjang hayat dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah, dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Setifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk pengakuan terhadap prestasi belajar, sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Beberapa contoh implementasi program belajar sepanjang hayat yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

1) Program Sekolah Lapang Akselerasi Ekonomi Produktif (SL-AEP) di Kabupaten Sukabumi SL-AEP adalah program pendidikan yang melayani warga masyarakat berlatar belakang (Pra-Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1) untuk memperoleh pelayanan pendidikan keterampilan ekonomi produktif, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan perilaku hidup sehat sesuai dengan minat, kebutuhan, serta kesiapan dan kemampuan yang dimiliki.

2) Program "Sekolah Menengah Pertama" Alternatif Qoryah Thoyyibah"di Desa Kalibening Kecamatan Tangkir Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Program SMP Alternatif Qoryah Thoyyibah merupakan bentuk program yang mengekspresikan misi pembebasan dan kemandirian sekolah sebagai institusi pendidikan, berdiri sejak Juli 2003 itu. Pembebasan berarti keluar dari belenggu aturan formal yang membuat peserta didik tidak kritis dan tidak kreatif. Sedang kemandirian berarti belajar tanpa bergantung apa pun dan siapa pun. Selama ini, lembaga pendidikan formal diasumsikan selalu membelenggu peserta didik dengan sederet aturan yang tidak jelas kepentingannya buat peserta didik, seperti baju seragam, sepatu seragam, dan masuk harus jam tujuh pagi. Dengan kata lain, sistem pendidikan di Indonesia yang telah berlangsung selama ini dipandang belum membebaskan. Peserta didik lebih banyak diperlakukan seperti robot; harus nurut, ikut kurikulum, sarat kekerasan, dan kadang sekadar mengejar nilai bukan proses.

Program di sekolah ini terinspirasi sistem pesantren klasik dan ide-ide pendidikan nonformal yang tidak bergantung pada tempat dan aturan formal. Biaya operasional sekolah yang semula hanya menempati teras dan garasi sang kepala sekolah ini diambil dari anggaran yang kecil untuk pendidikan SMP terbuka dan kocek wali murid. Setiap anak yang mau masuk, wali murid, dan pengelola bertemu untuk menentukan besaran kontribusi yang disanggupi. Tidak harus sama antara satu anak dan yang lainnya. Kebersahajaan itu dirancang sebagai perlawanan terhadap komersialisasi lembaga pendidikan formal.

3) Program Pendidikan Kesetaraan bagi Masyarakat Daerah Terpencil Melalui Pemanfaatan Radio Komunitas di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

Program ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala yang cukup mengganggu kinerja penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan yakni sulitnya memaksimalkan layanan pendidikan bagi kelompok-kelompok sasaran yang kurang memiliki kesempatan untuk akses secara langsung terhadap program-program pendidikan non formal, khususnya program Paket A dan Paket B. Padahal di satu sisi, komunitas ini memiliki *kebutuhan belajar yang cukup tinggi*, terutama kaitannya dengan peningkatan kualifikasi pendidikan minimal SLTP dan bahkan SMA yang dipersyaratkan oleh perusahaannya tempat bekerja. Kelompok sasaran seluruhnya berada di kawasan Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Mata pencaharian masyarakat sasaran sebagian besar adalah petani, buruh/karyawan, ibu rumah tangga, dan kelompok sasaran lainnya yang tidak terlayani kebutuhan belajarnya pada jalur pendidikan formal. Secara spesifik kelompok sasaran pembelajaran melalui radio komunitas ini adalah: *Drop out* (DO) Sekolah Dasar, Putus Jenjang SD, *Drop out* (DO) SLTP.

## 4) Program Pendidikan Keaksaraan Berbasis Kecakapan Hidupa pada PKBM Inayah di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makasar.

Program pendidikan keaksaraan di PKBM Inayah mampu menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembelajaran, program ini juga cukup memiliki keunggulan dalam hal jenis keterampilan VCO yang diintegrasikan. Substansi pembelajaran untuk pendidikan keaksaraan tingkat dasar, yang dijadikan muatan program belajar (tahun 2009) adalah yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan yang dielaborasikan dengan pendidikan vokasional, pembuatan VCO (Virgin Coconout Oil) dan pembuatan kue-kue kering sebagai ragi belajarnya. Sedangkan, program belajar bagi warga belajar pendidikan keaksaraan tingkat lanjutan, adalah menjahit dan pengemasan serta teknik pemasaran VCO.

# 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Ilmu di Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Program Pendidikan Anak Usia dengan besaran satuan pendidikan kelompok bermain dan taman penitipan anak. Namun demikian upaya perluasan di setiap daerah semakin dikembangkan, misalnya dengan memperkuat posyandu untuk kemudian ditingkatkan menjadi Pos PAUD, penguatan lembaga sosial lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini; contoh paling mutakhir dari penyelenggaraan program PAUD adalah program PAUD yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Ilmu di Kabupaten Semarang. Program PAUD Bina Ilmu termasuk program yang cukup baik dan bermutu, mengingat kelengkapan dari beberapa komponen pendukungnya, dilihat dari perspektif pengelolanya, pamong belajar/fasilitator/tutor, program belajar, sarana dan prasarana, hasil belajar, warga belajar, ragi belajar, kelompok belajar, panti belajar, ketersediaan dana belajar.

## 6) Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Komunitas di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

TBM sebagai lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat merupakan potensi dalam memberdayakan warga belajar khususnya dan masyarakat umum dalam memperoleh informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini juga masih menjadi domain pusat, di mana program yang diluncurkan belum mendapatkan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah, meskipun pada tahun 2007 pemerintah pusat telah memberikan stimulan berupa mobil untuk taman bacaan kepada pemerintah kabupaten/kota, di mana dana operasionalnya hendaknya dialokasikan oleh APBD kabupaten/kota. Di beberapa daerah yang menjadi lokasi penelitian, program pengembangan budaya baca ini lebih dikenal dengan nama yang berbeda, yaitu perpustakaan komunitas.

## 7) Program Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan yang Rentan Masalah Sosial dan Ekonomi.

Program pendidikan dan pemberdayaan perempuan, merupakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan perempuan,

khususnya mereka yang termarginalkan, baik karena faktor kultur maupun struktur. Progam pendidikan perempuan difokuskan pada dua hal, yakni peningkatan kesadaran perempuan akan hak-hak dasar kemanusiaan (HAM) dan peningkatan kemampuan/kecakapan perempuan yang dapat mendorong perempuan dapat berkiprah secara maksimal daalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Program pendidikan perempuan sementara ini masih menjadi domain pemerintah pusat, dalam arti bahwa pemerintah daerah belum ada yang menganggarkan dana untuk program yang sama dengan pemerintah pusat.

8) Program Kursus Wirausaha Desa dan Kursus Wirausaha Kota (KWD & KWK).

Program ini merupakan program yang mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar untuk kemudian dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan berekonomi. Program ini merupakan program yang bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengembangan sikap dan keterampilan kewirausahaan di pedesaan maupun di perkotaan. Program ini berjalan hampir semua provinsi di Indonesia, termasuk pada lima provinsi lokasi penelitian.

9) Program Kelompok Belajar Usaha Budidaya Ikan Jaring Terapung di Pinggiran Sungai Kapuas Kota Pontinak Provinsi Kalimantan Barat

Program kelompok belajar usaha yang dikembangkan di di PKBM Sejahtera Kota Pontinak adalah budiaya ikan melalui pengelolaan jaring terapung di pinggiran Sungai Kapuas. Program ini berjalan cukup baik dan efektif sehingga memperoleh simpati luas dari masyarakat. Warga masyarakat sekitar sungai yang pada awalnya pesimistis, setelah melihat perkembangan dan keberhasilan kelompok ini menjadi ikut simpatik dan bergabung dengan kelompok ini. Pendapatan masyarakat setiap bulannya mencapai 2 s.d 5 juta rupiah. Produk budidaya ikan dipasarkan ke beberapa pasar swalayan dan para pedagang kecil di sekitar Kota Pontianak dan Kalimantan Barat.

Kebermaknaan program belajar sepanjang hayat dapat dilihat dari dampaknya terhadap sikap dan perilaku serta harapan yang lebih positif dari peserta didik, baik yang menyangkut diri sendiri maupun yang menyangkut sistem sosial budaya. Sikap, perilaku dan harapan tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu;

1) Perubahan pada kebiasaan diri untuk menjadi pembelajar secara terus menerus.

Pada umumnya peserta didik memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan hasil belajar yang diperoleh pada program belajar sepanjang hayat melalui pembiasaan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini terutama terjadi pada pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan.

2) Perubahan dalam cara pandang terhadap lingkungan sekitar.

Peserta didik pada program belajar sepanjang hayat memiliki rasa percaya diri untuk dapat hidup dan menatap masa depan yang lebih baik. Pada umumnya mereka merasa dapat menemukan peluang untuk dapat hidup lebih baik atas dasar kemampuan yang dimiliki melalui program belajar sepanjang hayat.

3) Perubahan pandangan terhadap masa depan yang lebih optimis.

Perubahan ini ditandai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik, melahirkan dan memiliki generasi yang lebih baik, dan menjadi pendorong

terhadap anggota keluarga dan masyarakat lain untuk memanfaatkan program belajar sepanjang hayat.

Dampak program belajar sepanjang hayat terhadap aspek ekonomi dapat dilihat dari aspek nilai pertambahan ekonomi secara kuantitatif yang dapat dihitung. Lulusan program belajar sepanjang hayat mengaku bahwa terjadi perubahan positif dalam kehidupan berekonomi, diantaranya:

### 1) Diperolehnya pekerjaan baru

Meskipun pada beberapa kasus pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara swadaya atau berkelompok dalam sistem pembimbingan dari lembaga pendidikan. Kasus tersebut nampak pada usaha diversifikasi agroindustri di Jawa Barat, di mana lulusan pendidikan nonformal diwadahi dalam kelompok usaha ekonomi produktif.

### 2) Meningkatkan pendapatan ekonomi dalam pekerjaan yang sama

Kondisi ini lebih menonjol terjadi pada program pendidikan kecakapan hidup dalam berbagai jenis dan ragam program, seperti perbengkelan, pertanian, budidaya ikan, pengelolaan hutan tanaman produksi, jasa dan jenis kecakapan hidup lainnya..

### Implikasi dan Rekomendasi

#### A. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian tentang implementasi program belajar sepanjang hayat ini bagi berbagai pihak adalah sebagai berikut:

- 1. Belajar belajar sepanjang hayat harus menjadi landasan, prinsip dan asas penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sekaitan dengan hal tersebut, maka semua produk kebijakan pendidikan (baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) semestinya dikonseptualisasikan dari pikiran-pikiran belajar sepanjang hayat yang berorientasi pada filosofi pendidikan untuk semua. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam konteks melengkapi semua produk kebijakan pendidikan (Undang-undang dan Peraturan-peraturan) yang ada, sekaligus dapat dijadikan bahan kebijakan di bidang pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
- 2. Pada tingkat satuan dan program belajar sepanjang hayat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kurikulum/program pembelajaran yang komprehensif dan berbasis pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik.
- 3. Bagi praktisi/pengelola satuan dan program belajar sepanjang hayat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan program-program pendidikan sepanjang hayat di sekolah, masyarakat dan keluarga pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- 4. Bagi forum-forum pendidikan dan belajar sepanjang hayat, orangtua, dan masyarakat, hasil penelitian ini ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar

- dalam mengapresiasi *performance* satuan dan program belajar sepanjang hayat yang berada di wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum, khususnya mutu pendidikan sepanjang hayat.
- 5. Beberapa contoh implementasi program belajar sepanjang hayat yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelenggaraan program belajar sepanjang hayat, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 6. Bagi masyarakat pada umumnya, baik secara individual maupun komunal, program belajar sepanjang dapat dijadikan sebagai pilihan belajar yang menarik, karena lebih berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, sikap, dan kecakapan hidup yang berdimensi sosial dan ekonomi/peningkatan pendapat.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal merupakan organisasi kunci dalam pengembangan budaya belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan sepanjang hayat harus menjadi landasan pokok dalam penyelenggaraan program pendidikan di Indonesia.
- 2. Program belajar sepanjang hayat harus mengedepankan pengembangan potensi manusia (development of human potential) sebagai inspirasi pokok dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu, program belajar sepanjang hayat perlu memperhatikan kebutuhan belajar, motivasi belajar, visi dan tujuan, akses terhadap belajar, keterampilan dan kompetensi, bimbingan dan informasi, validasi dan umpan balik dari peserta didik.
- 3. Program belajar sepanjang hayat pada semua jalur pendidikan harus mempertimbangkan pengembangan sistem akreditasi (accreditation), penggunaan teknologi (technology issues), terintegrasi dalam penyelenggaraannya (integration), memperhatikan mutu (quality), dan didukung oleh pembiayaan yang memadai (finance).
- 4. Diusahakan terbit suatu regulasi dan atau aturan perundang-udangan yang nantinya efektif sebagai pedoman bagi para penyelenggara, praktisi dan penggiat program belajar sepanjang hayat
- 5. Lembaga atau satuan pendidikan sepanjang hayat, terutama pada jalur pendidikan non formal harus dibina, diawasi, dihidupi dan dibiayai tidak hanya dalam dimensi program, namun juga dari segi fasilitas, tempat, sarana dan prasarana.
- 6. Dalam konteks pengembangan pengkajian dan penelitian, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian lanjutan berupa observasi langsung dan uji coba di lapangan untuk memastikan sejauhmana kebijakan pendidikan, contoh-contoh program belajar sepanjang hayat, dan dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat dapat dieksplorasi lebih dalam, lebih luas dan lebih kaya dalam perspektif yang berbeda atau sekurang-kurangnya setara.

7. Keterbatasan jumlah dan kelompok responden yang dipilih dan berpartisipasi didalam penelitian ini ini, perlu dikembangkan lebih banyak dan bervariatif untuk mewakili berbagai kelompok berdasarkan !etak geeografis maupun beragam kelompok masyarakat pengguna lulusan satuan dan program belajar sepanjang hayat termasuk dunia usaha dan dunia industri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barbara, M. (1998). Practice Guide Assesing Lifelong Learning Technology (ALL-TECH): A Guide for Choosing and Using Technology for Adult Learning. NCAL Report.
- Blakely, R. (1972). The School and Continuing Education. (Paris UNESCO.
- Bogdan, RC dan Biklen, SK. (1982). *Qualitative Research for Education: Introduction to Theory and Methods.* Boston: Allyn and Bacon.
- Cropley, A.J. (1972). Lifelong Education: A Psychological Analysis. UNESCO.
- \_\_\_\_\_(1974). Pendidikan Seumur Hidup: Suatu Analisis Psikologis. Penyunting: Sardjan Kadir. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dave, R.H. (1973). Foundation of Lifelong Education. Oxford: Pergamon.
- Delors, J. and Team. (1998). Learning Tresure Within. New York: UNESCO.
- Depdiknas. (2005). Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_. (2003). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_\_, (2005). Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009. Jakarta: Depdiknas

- Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal. (2005). Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Jakarta: Ditjen PNFI.

- Duke, C. (1976). *Australian Perspectives In Lifelong Education*. Melbourne: Australian Council For Education Reasearch.
- Dumadezier, J. (1991). The School and Continuing Education. Paris: UNESCO.
- European Commission. Directorate General for Education and Culture. (2002). European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. Brussel.
- Elliot, G. (1999). *Lifelong Learning: The Politics, Practice and Program.* Canada: APEC.
- Field, J. (2000). *Lifelong and The New Educational Order*. UK and Sterling: Trentham Books.
- Hatton, M.J. (1977). *Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs*. Canada: APEC Publication
- Lengrand, P. (1970). An Introduction in Lifelong Education. Paris: UNESCO.
- Longworth, N & Davies, W.K. (1996). *Lifelong Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Mansell, R dan When, U. (1998). *United Nations Commission on Science and Technology Development*. UNSCTD.
- Miarso, Y. (2004). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustekkom Diknas & Kencana.
- Morrison, D. M., Mohaski, K. & Cotter, K. (2005). *Instructional Quality Indicators Research Foundations*. Cambridge, MA: Conect.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (2004-2009). Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah (2004-2009)*. Semarang.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2004). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (2004-2009)*. Pontianak.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2004-2009). Makassar.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan (2004-2009). Palembang.
- Sudjana, H.D. (2004). Pendidikan Non Formal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukukung, Asas,. Bandung: Falah Production.
- Wang, CY. (1997). Advancing Lifelong Learning through Adult Education in Chinese Taipei. In Hatton, M.J.